

PERSEPSI MASYARAKAT ATAS KINERJA DANA DESA PROVINSI JAWA TENGAH

Nurhidayati

*Program Studi Manajemen Keuangan Negara, Politeknik Keuangan Negara STAN,
Tangerang Selatan – Indonesia*

e-mail:

nurhidayati@pknstan.ac.id (*correspondence author*)

ABSTRACT

Empirically, the allocation of Village Funds has the potential to increase the output of infrastructure, health, and education, but is considered unable to improve welfare yet. Therefore, it is necessary to measure the assessment of the village community itself on the utilization of the Village Fund in their respective villages. This study aims to obtain the perception of rural communities in the Central Java Province regarding the performance of the Village Fund over the last few years. This research was conducted using a survey method to measure people's perceptions and then presented descriptively. Aspects that were measured in this survey are the development of physical development, assistance to the community, the adequacy of basic community needs, village apparatus services, as well as accountability, and community participation. As many as 487 respondents from 28 districts in Central Java filled out this survey. The results of the study indicated that during the last period, the village has experienced significant physical development, however, aspects of assistance to the community and services to the community still need to be improved.

Keywords: *Perception; Performance; Village Fund*

Diterima (Received) : 18-03-2022

Direvisi (Revised) : 14-12-2022

Disetujui (Approved) : 13-01-2023

Dipublikasi (Published) : 01-03-2023



©2023 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)

Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) :

CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dana Desa telah menghasilkan berbagai output sarana dan prasarana publik desa, termasuk juga memberikan dampak yang baik terhadap kualitas hidup masyarakat (Kementerian Keuangan, 2017). Di antaranya disebutkan selama periode tahun 2014 sampai dengan 2017 telah berhasil dibangun fasilitas fisik berupa jalan, jembatan, pasar desa, dan berbagai fasilitas fisik lainnya. Selain itu, pada periode tersebut, diklaim bahwa gini rasio turun ke angka 0.32 pada tahun 2017 dari sebelumnya 0.34 pada tahun 2014. Persentase penduduk miskin juga turun dari 14.09% menjadi 13.93%. Besaran Dana Desa yang dialokasikan juga meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2014. Rata-rata Dana Desa yang diterima per desa selama beberapa tahun terakhir menunjukkan indikasi peningkatan. Jika pada tahun 2018 per desa rata-rata memperoleh alokasi sekitar Rp800 juta, pada tahun 2019 alokasi Dana Desa rata-rata sebesar Rp933,9 juta. Pada tahun 2020 meningkat menjadi sekitar Rp960,6 juta per desa. Angka ini sudah mendekati Rp1 miliar per desa. Dengan besarnya porsi ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Desa perlu dievaluasi. Evaluasi ini diperlukan agar ada penataan manajemen desa untuk mengelola uang milyaran yang akan terus diterima desa (Mulyani, 2017). Selain itu evaluasi mendalam diperlukan agar pemanfaatan dana desa lebih optimal dan dikelola dengan baik, apakah semakin tepat sasaran dan masyarakat merasakan manfaat pembangunan dan kerja keras pemerintah. Masyarakat diharapkan juga turut berpartisipasi dalam mencermati program dan kegiatan di desa (Maharani, 2017).

Alokasi Dana Desa secara empiris berpotensi meningkatkan output infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, serta meningkatkan kinerja perekonomian, namun dianggap belum mampu meningkatkan kesejahteraan (Wibowo et al., 2019). Hal ini didukung oleh Muslihah (2019) yang menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa Dana Desa memberikan manfaat bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat (Muslihah et al., 2019). Banyak penelitian lain yang membuktikan tentang manfaat Dana Desa ini, terutama pada pembangunan pada desa terkait. Akan tetapi, penelitian tersebut banyak yang menggunakan data sekunder baik dari Badan Pusat Statistik atau lainnya dan juga penelitian secara kualitatif (Akbar & Sihalo (2019) ; Suharyono, (2020) ; Kurniawati et al., (2018) ; Daforsa & Handra (n.d.)). Belum banyak penelitian yang mengukur penilaian dari masyarakat desa itu sendiri atas pemanfaatan Dana Desa di desanya masing-masing. Selain itu, penelitian sebagian besar mengevaluasi dampak Dana Desa ini pada perkembangan pembangunan secara fisik dan kesejahteraan masyarakat atau penurunan kemiskinan, belum banyak yang mengukur aspek akuntabilitas dan partisipasi masyarakat desa.

Menurut data Ditjen Perimbangan Keuangan (2020), Provinsi Jawa Tengah dengan 29 Kabupaten dan 8.237 Desa adalah penerima Dana Desa terbesar pada tahun anggaran 2020. Pada tahun anggaran 2020, total Dana Desa yang dialokasikan ke desa-desa di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp8,116 trilyun. Sungguh angka yang besar untuk dipertanggungjawabkan. Angka ini pada tahun 2018 adalah sebesar Rp6,7 trilyun yang dialokasikan kepada 7.809 desa di Jawa Tengah. Pada tahun 2019, jumlah desa yang mendapatkan alokasi masih sebanyak 7.809 desa dengan total Dana Desa sebesar Rp7,889 trilyun. Dengan alokasi dana sebesar itu, sebanyak 1.636 desa mengalami peningkatan status desa, 345 desa mengalami penurunan status, dan 5.648 desa tidak mengalami perubahan status, serta 180 desa tidak dinilai karena data tidak lengkap. Sehingga pada tahun 2019, tersisa 15 desa sangat tertinggal di Jawa Tengah. Menariknya, perubahan besaran dana desa tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap perubahan status desa (Yulitasari & Tyas, 2020). Penelitian ini diharapkan dapat

melengkapi hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang sebagian besar meneliti dari aspek Dana Desanya itu sendiri dan aparat desa serta berdasarkan data sekunder.

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan penilaian kinerja Dana Desa menurut persepsi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Aspek kinerja Dana Desa meliputi tidak hanya pembangunan fisik, akan tetapi juga aspek pemberdayaan dan akuntabilitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Desa

Saat ini, pemerintah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa melalui Undang-Undang Dana Desa. Pemerintah diberikan mandat untuk mengalokasikan Dana Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (DPR, 2014). Sejak tahun anggaran 2014 sampai dengan sekarang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selalu mengalokasikan khusus untuk Belanja Dana Desa ini. Dalam Undang-Undang tentang Desa tersebut, Dana Desa dijelaskan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang ditujukan bagi Desa melalui APBD Kabupaten. Transfer ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menyebutkan alokasi Dana Desa didasarkan pada alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan penyaluran dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Ditjen Perbendaharaan, 2021).

Kinerja Dana Desa

Kinerja Dana Desa pada penelitian ini diukur dengan indikator pembangunan fisik, bantuan kepada masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan publik, dan akuntabilitas pengelolaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Kemendagri, 2019) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, kinerja dana desa dipandang dari sudut pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Pengukuran keberhasilan pada bidang pembangunan desa antara lain dilihat dari adanya pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastuktur dan lingkungan desa, sarana dan prasarana kesehatan, sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, sarana dan prasarana ekonomi serta pengembangan usaha ekonomi produktif, dan pelestarian lingkungan hidup. Pada bidang pembinaan masyarakat, indikator diukur dengan adanya pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, termasuk juga pembinaan lembaga adat dan kesenian, serta kegiatan lain sesuai dengan kondisi masing-masing desa. Kinerja desa juga diukur dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan usaha ekonomi, pertanian, dan perdagangan, pelatihan dalam bidang teknologi tepat guna, pendidikan dan pelatihan untuk seluruh perangkat desa termasuk kepala desa, dan tak kalah pentingnya kegiatan terkait peningkatan kapasitas masyarakat.

Di luar ukuran yang jelas kasat mata, kinerja desa perlu juga melihat penerapan *good governance* pada pengelolaan desa. Partisipasi, responsivitas, dan akuntabilitas merupakan bagian prinsip *good governance*, seperti yang dikemukakan *United Nations Development Program* (Astuti et al., 2021). *Good governance* ini merupakan syarat mutlak agar terwujud sistem pemerintahan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Transparansi yang berarti juga keterbukaan menekankan bahwa anggota masyarakat mempunyai hak serta akses yang sama untuk dapat memperoleh informasi proses penganggaran karena berhubungan dengan aspirasi dan kepentingan orang banyak (Astuti et al., 2021). Akuntabilitas berhubungan dengan pertanggungjawaban, penjelasan kinerja dan tindakan seseorang atau organisasi kepada pihak yang berkepentingan atas pertanggungjawaban tersebut (Astuti et al., 2021).

Aspek akuntabilitas menimbulkan kewajiban seseorang untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan/atau tindakan seseorang/ pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang berhak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Nafidah & Anisa, 2017). Pelayanan menunjukkan kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam berinteraksi sehingga tercipta kepuasan pihak yang menerima pelayanan (Garvera, 2018). Pelayanan publik yang baik diberikan tanpa memandang status, pangkat, dan golongan dari suatu masyarakat. Artinya, seluruh lapisan masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan publik tersebut sesuai pedoman tata laksana pelayanan (Agustin, 2015). Sebagai penikmat, masyarakat akan menilai sejauh mana pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat desa, apakah sesuai harapan mereka atau belum memenuhi harapan. Masyarakat berharap layanan yang cepat, tidak pandang bulu, dan juga efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat desa di wilayah Jawa Tengah secara random. Survei dilaksanakan pada awal tahun 2020 dengan membagikan *Googleform* untuk selanjutnya diisi oleh responden. Provinsi Jawa Tengah dipilih karena merupakan provinsi penerima terbesar alokasi Dana Desa dengan jumlah desa yang cukup banyak. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Dalam studi ini, sumber data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner melalui *Googleform*. *Googleform* disebarkan pada awal tahun 2020 sampai dengan pertengahan Maret 2020. Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator yang ada pada penelitian sebelumnya maupun pada peraturan terkait. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai dengan 5, dimana 1 = sangat tidak setuju/sangat tidak baik dan 5 = sangat setuju/sangat baik. Sejak tahun 2014, desa sudah menerima alokasi Dana Desa dalam jumlah yang signifikan. Penelitian ini mengukur persepsi masyarakat desa atas perkembangan aspek fisik dan non-fisik di desa. Oleh karena adanya alokasi Dana Desa, pembangunan di desa pasti juga dipengaruhi oleh kinerja Dana Desa ini, sehingga kuesioner disusun juga dengan mengadopsi salah satunya dari Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 dan Nomor 20 Tahun 2018 untuk aspek evaluasi penerapan pengelolaan Dana Desa.

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini mengukur persepsi masyarakat dalam skala Likert. Responden yang mengisi sejumlah 495 yang tersebar di 28 Kabupaten di Jawa Tengah. Responden yang mengisi kuesioner ini memiliki kriteria bahwa responden sudah tinggal lebih dari 4 (empat) tahun di desa yang menjadi domisili pengisian kuesionernya. Hasil survei yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan pengecekan kelengkapan pengisiannya. Terdapat 487 data responden yang dinilai lengkap dan valid untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif. Dengan

menggunakan formula Slovin, jika jumlah desa di Jawa Tengah yang memperoleh alokasi Dana Desa sebanyak 7.089 desa, maka sampel minimal adalah 378 desa. Dengan data responden sebanyak 487 responden, sudah memenuhi syarat perhitungan formula Slovin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Responden yang mengisi secara valid dan lengkap sebanyak 487 responden. Responden tersebar di 28 Kabupaten di Jawa Tengah. Profil lengkap responden disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Profil Responden

Jenis Kelamin		Usia	
Laki-laki	249	15 s.d. 30 tahun	204
Perempuan	238	30 s.d. 45 tahun di atas 45 tahun	83 200
Pekerjaan		Pendidikan	
ASN/TNI/POLRI	51	SD/SMP/setara	65
Wiraswasta	76	SMA/D1	206
Karyawan/Buruh	52	D3	65
Petani	12	D4/S1	138
Pelajar/Mahasiswa	108	S2/S3	13
Lainnya	188		

Sumber: diolah dari kuesioner (2021)

Dari Tabel 1, responden laki-laki dan perempuan tidak terlalu berbeda jauh jumlahnya. Akan tetapi dari sisi usia responden, didominasi oleh kelompok usia muda (15 sampai dengan 30 tahun) dan kelompok usia tua (di atas 45 tahun). Jika ditinjau dari sisi pekerjaan atau profesi responden, kelompok petani sangat sedikit, wiraswasta juga cukup banyak. Sebagian besar responden kelompok usia muda adalah pelajar/mahasiswa. Sedangkan untuk pekerjaan lainnya, diisi cukup beragam oleh responden, dari profesi guru honorer sampai dengan ibu rumah tangga. Dominasi level pendidikan responden adalah SMA/D1 dan D4/Sarjana. Akan tetapi masih ada juga yang masih lulusan SD dan sedikit yang berpendidikan S2/S3. Beragamnya pekerjaan/profesi maupun pendidikan responden, menggambarkan kondisi desa masa kini bahwa desa itu tidak lagi didominasi oleh masyarakat yang fokus pada sektor pertanian/agraris. Sektor pertanian bukan lagi sektor penyokong perekonomian di desa.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Item kuesioner yang diajukan dalam penelitian ini sebanyak 30 pertanyaan dengan 487 responden. Untuk menguji validitas tiap item pertanyaan ini, dilakukan uji validitas terhadap tiap item kuesioner.

Tabel 2
Uji Validitas

No	R Hitung	Keterangan	No	R Hitung	Keterangan
1.	0,517	Valid	16.	0,599	valid
2.	0,517	Valid	17.	0,619	valid
3.	0,608	Valid	18.	0,644	valid
4.	0,513	Valid	19.	0,645	valid
5.	0,605	Valid	20.	0,556	valid
6.	0,567	Valid	21.	0,640	valid
7.	0,596	Valid	22.	0,525	valid
8.	0,629	Valid	23.	0,711	valid
9.	0,614	Valid	24.	0,730	valid
10.	0,572	Valid	25.	0,667	valid
11.	0,573	Valid	26.	0,680	valid
12.	0,495	Valid	27.	0,715	valid
13.	0,561	Valid	28.	0,710	valid
14.	0,339	Valid	29.	0,695	valid
15.	0,580	Valid	30.	0,745	valid

Sumber: diolah dari hasil kuesioner (2021)

Selanjutnya, dari hasil uji validitas, butir-butir pertanyaan yang valid kemudian dianalisis reliabilitasnya. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur keandalan dan konsistensi kuesioner yang digunakan. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas dalam penelitian ini adalah metode Cronbach's Alpha. Hasil pengujian reliabilitas atas seluruh pertanyaan menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliabel dengan nilai Cronbach's Alpha 0,944 dimana sudah melebihi nilai minimal 0,7.

Analisis Deskriptif

Indikator kuesioner mencakup pembangunan sarana/prasarana fisik, bantuan kepada masyarakat, kecukupan kebutuhan pokok, pelayanan desa, dan akuntabilitas.

Tabel 3
Penilaian Indikator Keseluruhan

Indikator	Skor Penilaian
Pembangunan fisik	3,712
Bantuan kepada masyarakat	3,559
Kecukupan kebutuhan pokok	3,936
Pelayanan aparat desa	3,611
Akuntabilitas	3,614

Sumber: diolah dari hasil kuesioner (2021)

Pada Tabel 3, secara keseluruhan persepsi penilaian masyarakat desa terhadap kinerja desa dalam aspek pembangunan fisik pemberian bantuan kepada masyarakat, pemenuhan kebutuhan pokok atau dasar, pelayanan aparat desa, serta akuntabilitas dan

peran serta masyarakat, bernilai cukup baik, di atas 3,00. Akan tetapi, secara detil, kecukupan kebutuhan pokok memperoleh penilaian tertinggi 3,969 dan yang memperoleh penilaian terendah adalah aspek bantuan kepada masyarakat dengan nilai 3,559.

Analisis Deskriptif Menurut Kabupaten

Indikator kuesioner mencakup pembangunan sarana/prasarana fisik, bantuan kepada masyarakat, kecukupan kebutuhan pokok, pelayanan desa, dan akuntabilitas per kabupaten.

Tabel 4
Penilaian Persepsi Masyarakat Per Kabupaten

Kabupaten	Pembangunan Fisik	Bantuan kepada masyarakat	Kesejahteraan/ kecukupan kebutuhan masyarakat	Pelayanan	Akuntabilitas dan peran serta masyarakat
Banyumas	3,829	3,738	4,060	3,731	3,676
Batang	3,654	3,458	4,071	3,714	3,733
Blora	3,473	3,125	3,659	3,182	3,218
Boyolali	3,867	3,948	3,854	3,990	3,933
Brebes	3,600	3,552	3,313	3,344	3,350
Cilacap	3,686	3,875	3,750	3,554	3,571
Demak	3,960	3,888	3,900	3,475	3,374
Grobogan	3,000	3,563	3,875	3,219	3,250
Jepara	3,537	3,349	4,342	3,783	3,474
Karanganyar	4,056	3,259	4,139	3,874	3,711
Kebumen	4,058	3,826	4,056	3,891	4,071
Kendal	4,280	4,088	4,075	3,788	4,160
Klaten	3,735	3,466	3,993	3,632	3,641
Kudus	3,711	3,299	4,056	3,604	3,089
Magelang	3,540	3,546	4,083	3,638	3,613
Pati	3,350	3,156	3,250	2,781	2,450
Pekalongan	3,680	3,450	4,050	3,613	3,653
Pemalang	3,833	3,500	3,667	3,396	3,310
Purbalingga	4,015	3,817	4,038	3,699	4,062
Purworejo	3,829	3,625	4,161	3,938	4,129
Rembang	3,400	3,625	3,625	3,813	4,300
Semarang	4,036	3,966	4,341	3,955	3,964
Sragen	3,850	3,552	4,292	3,813	3,683
Sukoharjo	3,728	3,382	4,184	3,842	3,706
Tegal	2,743	2,670	3,125	2,670	3,057
Temanggung	3,559	3,490	3,917	3,490	3,300
Wonogiri	4,000	3,859	4,188	3,828	3,825
Wonosobo	3,920	3,583	4,150	3,857	3,880

Sumber: diolah dari hasil kuesioner (2021)

Jika ditinjau dari Tabel 4, yang memperoleh skor rata-rata penilaian persepsi masyarakatnya untuk seluruh indikator di bawah 3,0 adalah Kabupaten Tegal dan

Kabupaten Pati. Sedangkan persepsi masyarakat dengan nilai di atas 4,0 adalah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal. Kemudian, secara keseluruhan aspek, yang memperoleh skor penilaian persepsi paling rendah adalah aspek akuntabilitas di wilayah Kabupaten Pati dengan skor 2,450. Aspek yang mendapat penilaian di atas 3,0 untuk seluruh kabupaten adalah aspek kecukupan pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum masyarakat desa sudah tercukupi kebutuhan dasarnya dari kebutuhan pangan sampai dengan kesehatan.

Pembahasan

Dari keseluruhan aspek yang dinilai oleh responden, pembangunan fisik memperoleh nilai yang cukup baik, meskipun masih di bawah nilai 4 dalam skala 5. Akan tetapi merupakan indikator terbaik daripada indikator yang lain. Hal ini mendukung penelitian-penelitian yang lain, dimana manfaat Dana Desa terhadap pembangunan fisik fasilitas publik di desa memang sangat signifikan, seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar desa, posbindu, saluran air, drainase, dan fasilitas publik lainnya (Akbar & Sihaloho, (2019) ; Wibowo et al., (2019) ; Richard et al., (2016) ; Putra Marvianto et al.,(n.d.)). Hal ini juga didukung dengan laporan pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dalam Buku Pintar Dana Desa bahwa lebih dari 80% Dana Desa terserap untuk kegiatan pembangunan fisik. Untuk periode-periode awal Dana Desa hal tersebut dirasa cukup wajar. Akan tetapi untuk tahun-tahun ke depan, pemerintah desa perlu bersinergi dengan masyarakat desa untuk merencanakan kegiatan desa dengan baik agar Dana Desa dapat terserap optimal kepada hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan desa. Jika pada periode-periode awal banyak terserap pada aspek fisik, tahun ke depan perlu dipikirkan ke pembangunan non-fisik masyarakat desa disertai pertanggungjawaban yang tepat.

Aspek pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menduduki penilaian terbesar kedua setelah aspek pembangunan fisik. Penelitian Muslihah et al., (2019) membuktikan bahwa Dana Desa berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi hal ini berbeda dengan penelitian Wibowo et al., (2019) yang menyatakan bahwa Dana Desa tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut, apakah memang kesejahteraan atau kecukupan kebutuhan masyarakat tersebut memang dibantu pemenuhannya dari Dana Desa atau dari usaha sendiri masyarakat. Akan tetapi hasil ini cukup melegakan karena secara umum kebutuhan masyarakat akan pangan dan kesehatan cukup baik. Ditinjau lebih detil per kabupaten, untuk aspek kecukupan kebutuhan dasar tidak ada yang nilainya di bawah 3,00.

Indikator yang memperoleh penilaian paling rendah adalah indikator adanya bantuan kepada masyarakat. Lebih lanjut, aspek bantuan kepada masyarakat yang dinyatakan dalam butir pernyataan kuesioner adalah terkait bantuan fasilitas kerja kepada masyarakat, bantuan untuk peningkatan peluang kerja, bantuan biaya pendidikan, dan bantuan fasilitas kesehatan (termasuk bantuan iuran BPJS). Relatif kecilnya penerimaan masyarakat akan bantuan ini sejalan dengan apa yang disampaikan pemerintah, bahwa 80% lebih Dana Desa saat ini dialokasikan ke pembangunan fisik (kondisi sampai dengan survei dilakukan). Meskipun secara realisasi tahun 2020, terdapat perubahan kebijakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Arah kebijakan Dana Desa 2021 juga difokuskan ada aspek pemulihan perekonomian desa, antara lain penguatan program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial berupa BLT, pemberdayaan UMKM dan sektor usaha pertanian, peningkatan produktifitas dan transformasi ekonomi desa melalui desa digital, dan pengembangan potensi desa melalui peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (Ditjen Perimbangan Keuangan, 2021).

Indikator atau aspek yang juga perlu diperhatikan adalah aspek pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas termasuk keterlibatan peran serta masyarakat. Pada penelitian ini, aspek pelayanan kepada masyarakat mendeskripsikan apakah aparat desa terlihat lebih bertanggung jawab, apakah pelayanan kepada warga semakin cepat, ramah, dan tidak berbelit-belit, serta adanya kepedulian aparat terhadap warga. Aspek akuntabilitas dijabarkan sebagai perwujudan apakah terdapat informasi tentang Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dipasang dan diinformasikan kepada warga, apakah dalam perencanaan penggunaan Dana Desa meminta aspirasi dari masyarakat, apakah aparat desa Menyusun penggunaan Dana Desa berdasarkan kebutuhan warga, dan apakah terdapat permintaan masukan atas hasil penggunaan Dana Desa. Pada aspek ini, meskipun secara rata-rata provinsi memperoleh skor penilaian di atas 3,614, masih terdapat kabupaten yang responden warga desanya memberikan penilaian di bawah 3,00.

Indikator pelayanan publik sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat desa. Pelayanan publik yang baik ditunjang oleh kedisiplinan aparat desa sehingga akan menghasilkan kepercayaan warga desa yang bermuara pada hubungan aparat dan warga desa yang harmonis. Pelayanan kepada warga desa ini didasarkan pada prinsip kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu dalam pelayanan (Garvera, 2018).

Menurut Nur et al., (2019), kompetensi aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap akuntabilitas Dana Desa. Hal ini didukung oleh studi Budiarto et al., (2020), dimana kompetensi aparat pengelola desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Jika ditinjau per kabupaten, hampir seluruh kabupaten memperoleh skor di atas 3,00 untuk aspek pembangunan fisik dan bantuan kepada masyarakat, kecuali Kabupaten Tegal. Hal ini menarik karena Kabupaten Tegal masuk 5 (lima) besar kabupaten di Jawa Tengah yang memperoleh alokasi Dana Desa di Jawa Tengah. Jika digali lebih lanjut dari profil responden, responden warga desa di Kabupaten Tegal ini hanya dari 6 (enam) desa saja, dan ada 2 (dua) desa yang cenderung memperoleh nilai lebih kecil dibanding desa lainnya, yaitu Desa Karangjati dan Desa Cangkring. Studi lebih lanjut terhadap kedua desa ini layak untuk dilaksanakan.

Kabupaten Pati juga mendapatkan penilaian yang tidak terlalu baik untuk aspek pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas, yaitu 2,781 untuk pelayanan kepada masyarakat dan 2,450 untuk aspek akuntabilitas. Responden Kabupaten Pati hanya berasal dari 2 (dua) desa yaitu Desa Mantingan dan Desa Sidomukti. Studi kepada 2 (dua) desa ini juga layak untuk ditindaklanjuti.

SIMPULAN DAN SARAN

Aspek pembangunan fisik cukup berkembang pesat dengan adanya Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar (kesejahteraan) dan pembangunan fisik memperoleh persepsi penilaian cukup baik dari responden yang merupakan warga desa setempat. Sedangkan aspek bantuan kepada masyarakat desa, aspek pelayanan publik, dan aspek akuntabilitas perlu lebih diperhatikan walaupun secara rata-rata penilaian juga di atas nilai 3,00, karena jika ditinjau per kabupaten masih terdapat kabupaten yang warga desanya memberikan skor penilaian di bawah 3,00.

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden, meskipun ada bagian pertanyaan terbuka yang juga diisi oleh responden. Tidak semua

desa di lingkup wilayah JawaTengah terdapat respondennya. Penelitian lanjutan dapat dilakukan per desa atau per kabupaten secara lebih spesifik dengan responden yang lebih banyak lagi per desa. Aspek yang perlu digali lebih dalam adalah aspek terkait pelayanan perangkat desa, dampak secara perilaku kepada masyarakat desa, partisipasi masyarakat, dan juga akuntabilitas pengelolaan desa.

Penelitian ini juga hanya menyajikan secara deskriptif persepsi masyarakat. Akan jauh lebih bermakna jika dilakukan studi lanjutan untuk menguji keterkaitan antar variabel maupun pengaruhnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, M. (2015). Kinerja Aparatur Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Desa Petani Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. In *Jom FISIP* (Vol. 2, Issue 1).
- Akbar, M. T., & Sihaloho, E. D. (2019). The Impact of Village Fund Program in Developing Physical Infrastructure: Case on Construction Value Across Provinces in Indonesia. *Media Trend*, 14(2), 194–200. <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v14i2.4841>
- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.628>
- Daforsa, F., & Handra, H. (n.d.). Analysis of village fund management in poverty alleviation at Pasaman Regency, West Sumatra. In *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* (Vol. 6, Issue 6).
- Ditjen Perbendaharaan. (2021). Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, Dan Prioritasnya. Retrieved December 12, 2021, from <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian-sumber-dana-penyaluran-dana-dan-prioritasnya.html>
- Ditjen Perimbangan Keuangan. (2020). Dana Desa - Kemenkeu. Retrieved January 10, 2022, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/09/7.-DANA-DESA.pdf>
- Ditjen Perimbangan Keuangan. (2021, February). Kebijakan Dana Desa 2021. Retrieved December 15, 2021, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-Dana-Desa-2021.pdf>
- Garvera, Rindu R. (2018). Kinerja Aparat Desa Dalam Pelayanan Publik di Desa Nagrapageuh Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Fisip Universitas Galuh.
- Kurniawati, S., Ramdhani Djayusman, R., & Lukman, A. (2018). *The Influence of Village Funds* (Vol. 39, Issue 1). <http://www.republika.co.id>
- Maharani, P. (2017, July 28). Pemerintah evaluasi Dana Desa agar pemanfaatan lebih optimal. Retrieved December 31, 2021, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/pemerintah-evaluasi-dana-desa-agar-pemanfaatan-lebih-optimal.html>
- Mulyani, S. (2017, August 09). Sri Mulyani jelaskan pentingnya program Dana Desa. Retrieved January 12, 2022, from <https://nasional.tempo.co/read/898320/sri-mulyani-jelaskan-pentingnya-program-dana-desa>
- Muslihah, S., Octavana Siregar, H., Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Jl ProfDrMrDrs Notonegoro, D., & Akuntansi YKPN Jl Gagak Rimang, A. (2019). *Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. 7(1), 85–93.

- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2). <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Nur, M., Sawitri, A., & Prastiti, D. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. In *Jurnal Akuntansi Aktual* (Vol. 6, Issue 2).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. (2019, August 1). Pengelolaan Keuangan Desa. Retrieved December 15, 2021, from <https://kemendagri.go.id/arsip/detail/9954/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Pintar, B., Desa, D., & Rakyat, U. K. (n.d.). *A Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Indonesia Dana Desa*.
- Putra Marvianto, R., Wahyono, M., & Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggung Kabupaten, A. (n.d.). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa (Study Di Desa Mojogede Kec Balongpanggung Kab Gresik)*.
- Richard, O., Allokendek, C., Kimbal, M. L., & Undap, G. (n.d.). *Peran Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Pembangunan Infrastruktur Di Desa Darunu Kecamatan Wori*.
- Setyo Budiarto, D., Dwi Setyaningrum, A., Purnama Sari, R., PGRI Yogyakarta, U., Tersedia Pada, A., & Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya, A. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya Sitasi. *Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2). <https://doi.org/10.35591/wahana>
- Suharyono, S. (2020). Evaluasi Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 648. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.963>
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. (2014). Desa. Retrieved January 15, 2022, from https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf
- Wibowo, H., Mulya, I. T., & Mujiwardhani, A. (2019). Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Impact of Village Fund Allocations for Regional Development and Community Welfare. In *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)* (Vol. 1, Issue 2). <https://anggaran.e-journal.id/akurasi>
- Yulitasari, Y., & Tyas, W. P. (2020). Dana Desa dan Status Desa di Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(2), 74-83. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.2.74-83>